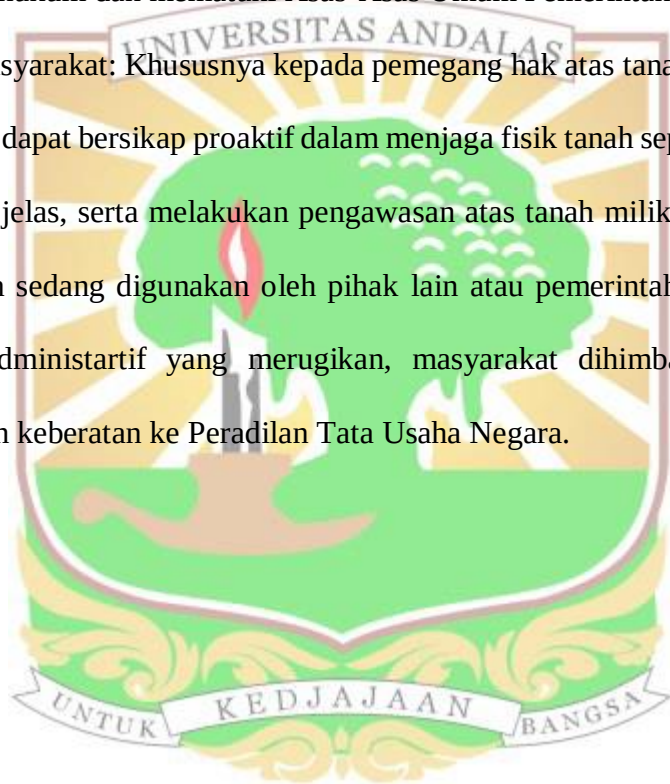


pemerintah. Penerbitan sertifikat harus melalui prosedur pelacakan yang mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) untuk menghormati hak-hak warga negara.

2. Kepada Pemerintah Kota Solok: Pemerintah Kota Solok dalam melakukan pengadaan tanah diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban administratif dan menunaikan hak keperdataan terlebih dahulu agar terjadi pelepasan hak yang sah. Sebagai badan publik, Pemerintah Kota Solok seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum dan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
3. Kepada Masyarakat: Khususnya kepada pemegang hak atas tanah atau ahli waris, diharapkan dapat bersikap proaktif dalam menjaga fisik tanah seperti memberikan batas yang jelas, serta melakukan pengawasan atas tanah miliknya, terlebih jika objek tanah sedang digunakan oleh pihak lain atau pemerintah. Apabila terjadi tindakan administratif yang merugikan, masyarakat dihimbau untuk segera mengajukan keberatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta: Djambatan.

Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam*

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Koniliasi, Mediasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Visi Media.

Lubis, Yamin, et.al. 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas.

Muhamad Sadi, Khalisah Hayatuddin dan Suharyono, 2022, *HUKUM AGRARIA DI INDONESIA*, Jakarta: Prenada Media.

Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2016, *SERI HUKUM HARTA KEKAYAAN: HAK – HAK ATAS TANAH Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

R. Wiyono, 2009, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Sinar Grafika

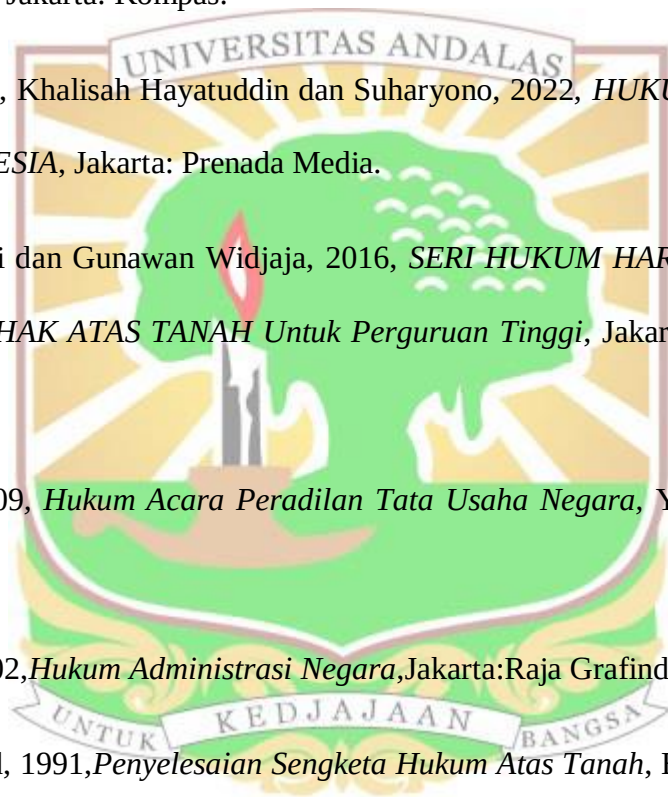
Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.

SF. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Yogyakarta*, Yogyakarta: FH UII Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press



Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sutarman, 2007, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan di Wilayah Laut*, Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Chaterine Virginia, *“Penyelesaian Sertifikat Ganda yang Terbukti Terbit Akibat Kelalaian Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN)”*, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 2, No. 3, 2024.

Deni Hermawan, *“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pakai Barang Milik Negara”*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2025.

Dewi Anggraeni, *Et. Al.*, *“Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan”*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, Nomor 8, 2023.

Dios Ferdian Herefa, *“Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah dalam Menunjang Pembangunan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020.

Dwi Sugianto, *“Karateristik Hak Pakai atas Tanah dan Permasalahannya dalam Praktik Pertanahan Indonesia”*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 No. 2, 2020.

Edi Antoni Ginting dan Tetti Samosir, *“Akibat Hukum Terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Tumpang Tindih”*, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 3, No.1 ,2024.

Fajri Lio Sandika, *Et Al.*, *“Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi”*, Blantika: Multidisciplinary Journal, Vol. 1, No. 3, 2023.

- Gayatri S. dan Suryani, *“Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi”*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Hendrina, Rambu, *et.al.*, *“Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Ismail, Ilyas, *“Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum”, Vol. 13, No. 1, 2011.
- Iwan Permadi dan Endrianto Bayu S., *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Hak Eigendom Yang dikuasai Oleh Pemerintah Dengan Sertifikat Hak Pakai”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Iwan Permadi, Et. Al., *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Hak Eigendom Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Dengan Sertifikat Hak Pakai”*, YURISPRUDEN: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Junaidi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, Jurnal Notary Law Research, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Michael Christopher dan Benny Djaja, *“Legal Status of Duplicate Land Certificates and Mechanisme for Their Resolution Under the National Land Law System”* Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Putu Eva Ditayani, Et Al., *“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat”*, JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Satrio Ardi Kartono, *“Politik Hukum Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020

Slamet, Weny, *et.al.*, "PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH", Journal of Comprehensive Science, Vol. 2, No. 6, 2023

Sukmawati, Putu Diva, "*Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 2, 2022

Suryani Sappe, *et.al.*, "*Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa*", Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2, No. 1, 2021

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>.

<https://iblam.ac.id/2024/01/20/mengenal-istilah-eigendom-sebagai-status-kepemilikan/>

